
LAPORAN HIBAH PENELITIAN
PHK A2 JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN

Tahun Anggaran 2007

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI
KTSP
DI SEKOLAH DASAR PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Penanggung jawab Kegiatan
Setya Raharja, M.Pd.

JURURSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2007

LAPORAN HIBAH PENELITIAN
PHK A2 JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN

Tahun Anggaran 2007

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI KTSP
DI SEKOLAH DASAR PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



Tim Peneliti:
Setya Raharja
B. Suryosubroto
Suyud
Tina Rahmawati

JURURSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2007

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI KTSP DI SEKOLAH DASAR PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Peneliti:

Setya Raharja, B. Suryosubroto, Suyud, Tina Rahmawati

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran komite sekolah dalam implementasi KTSP khususnya dalam penyusunan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasinya. Di samping itu, juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi sekolah serta upaya-upaya mengatasinya yang telah dilakukan sekolah dalam rangka meningkatkan peran komite sekolah tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan maksud untuk mengungkap peran komite sekolah dalam implementasi KTSP. Populasi penelitian ini adalah SD di Propinsi DIY. Penelitian ini menggunakan pendekatan sampling, dengan *teknik quota sampling* hingga memenuhi 48 sekolah. Oleh karena itu tidak semua kabupaten/kota di DIY menjadi wilayah penelitian, namun hanya diambil Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Selanjutnya dari masing-masing daerah tersebut diambil 24 sekolah negeri. Data dikumpulkan dengan angket. Di samping itu, dilakukan diskusi terfokus (*focus group discussion*) untuk mempertajam data agar makin akurat dan lengkap. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Peran komite sekolah yang menonjol dalam langkah persiapan implementasi KTSP di SD adalah sebatas pada peran memberi dukungan dan memberikan pertimbangan. (2) Peran yang paling banyak dilakukan oleh Komite Sekolah dalam Tahap Penyusunan KTSP adalah memberikan dukungan kepada sekolah, kecuali pada saat pembahasan I draf KTSP, Komite Sekolah lebih banyak memberikan pertimbangan. (3) Peran Komite Sekolah dalam tahap pelaksanaan KTSP, cenderung berperan mendukung dan memberi pertimbangan, kecuali pada aspek yang berkenaan dengan keuangan dan pengendalian; Komite Sekolah cenderung melaksanakan dua peran yaitu mendukung dan mengontrol. (4) Peran Komite Sekolah dalam tahap monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut cenderung pada peran mendukung, mempertimbangkan, dan mengontrol. (5) Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran komite sekolah dalam implementasi KTSP di SD, antara lain: pemahaman KTSP kurang, kurangnya dana komite, kesibukan bekerja, SDM komite kurang, sulitnya koordinasi, sosialisasi peran komite belum efektif, frekuensi pertemuan kurang, fasilitas belum lengkap, pengurus komite kurang aktif, latar belakang komite (pendidikan, pekerjaan), serta komunikasi antar sekolah dengan komite masih kurang.

Kata kunci: Komite sekolah, KTSP, Peran Komite Sekolah

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penelitian Hibah Penelitian ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penelitian ini banyak pihak telah membantu dan berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada:

1. Ditjen Dikti melalui KPMPT dan Pengelola PHK A-2 Jurusan AP FIP UNY.
2. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Lembaga Penelitian UNY, yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini melalui BPP.
3. Para Nara Sumber yang telah berkenan memberikan wawasan dan masukan yang sangat bermakna bagi berlangsungnya penelitian ini.
4. Para Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru SD sampel yang telah berkenan bermitra kerja dengan tim peneliti dan sumbang saran yang sangat berarti untuk keterlaksanaan penelitian ini.
5. Para mahasiswa yang telah membantu dalam proses pengumpulan data untuk keperluan penelitian ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar sampai dengan tersusunnya laporan ini.

Kritik dan saran perbaikan dari berbagai pihak senantiasa kami harapkan, dan kami tetap berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, November 2007

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Manajemen Sekolah	12
B. Peran Serta Masyarakat	15
C. Peran dan Fungsi Komite Sekolah	24
D. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
C. Populasi dan Sampel Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Deskripsi Setting Penelitian	40
B. Tahap Persiapan Implementasi KTSP di SD	40

C. Tahap Penyusunan KTSP di SD	47
D. Tahap Pelaksanaan KTSP di SD	55
E. Tahap Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	74
F. Kendala-kendala Peran Komite Sekolah	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsekuensi dari kebijakan otonomi pendidikan, antara lain bahwa setiap sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, diharapkan akan mampu mengatur dirinya sendiri secara bertanggung jawab dengan memberdayakan seluruh komponen sekolah. Untuk itu, sekolah dituntut mampu memahami posisi dirinya dan mengelola serta mengoptimalkan potensi yang dimilikinya untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah. Selain itu, sekolah juga harus mampu mengambil keputusan yang terbaik atas dirinya sendiri dengan didukung oleh kemampuan manajemen yang handal, dengan didukung oleh seluruh warga sekolah dan masyarakat, untuk mewujudkan tujuan yang telah disepakati bersama oleh seluruh warga sekolah tersebut.

Untuk mengatasi berbagai kelemahan dari upaya perbaikan mutu pendidikan yang telah dilakukan selama ini, maka pemerintah telah mencanangkan pemberlakuan pola manajemen yang berbasis di sekolah atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai pola baru dalam manajemen sekolah, yang secara bertahap diharapkan akan mampu mewujudkan upaya perbaikan mutu pendidikan kita sebagaimana yang diharapkan.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah pola manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong

pengambilan keputusan secara partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, karyawan, orangtua siswa dan masyarakat) dalam rangka meningkatkan mutu sekolah dalam kerangka kebijakan nasional. Dengan kata lain, MBS merupakan pola manajemen baru yang bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada sekolah (pengelola sekolah) untuk mengelola sekolah tersebut dalam rangka untuk meningkatkan mutu sekolahnya.

Sementara itu, sebagai indikator keberhasilan sekolah dalam mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) adanya peningkatan otonomi atau kemandirian sekolah dalam mengelola sekolahnya; (2) adanya perubahan dalam sistem pengambilan keputusan ke arah pengambilan keputusan secara partisipatif, yang melibatkan semua komponen sekolah; (3) adanya peningkatan peran serta orangtua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan (4) adanya upaya dalam perbaikan praktik pembelajaran, menuju pembelajaran yang efektif dalam rangka untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan demikian, keterlibatan orangtua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi MBS dalam rangka mewujudkan kemandirian sekolah.

Di Indonesia, upaya pelibatan orangtua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebenarnya telah lama diupayakan, antara

lain seperti yang dimanifestasikan dalam bentuk kelembagaan seperti: POMG, BP3, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Namun keterlibatan tersebut pada umumnya masih sebatas dalam bentuk dukungan dana untuk penyelenggaraan pendidikan atau dukungan *input* (seperti: iuran BP-3, SPP, POMG dan sebagainya). Sementara itu, keterlibatan orangtua siswa dan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang program-program sekolah, proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah, evaluasi dan akuntabilitas program sebagaimana yang diidealkan oleh konsep MBS hampir-hampir belum pernah dapat terealisasikan. Masih rendahnya kesadaran orangtua dan masyarakat mengenai arti penting keterlibatan mereka dalam pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan orangtua, faktor budaya dan sikap orangtua yang cenderung mempercayakan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada sekolah, diduga menjadi kendala utama dalam upaya pelibatan orangtua dalam pendidikan anaknya di sekolah. Disamping itu, sikap sebagian administrator sekolah dan guru, dan sikap serta keterbukaan pihak sekolah yang kurang mendukung, juga dapat menjadi penyebab rendahnya keterlibatan orangtua dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Telah diketahui bahwa dengan tidak diberlakukannya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) dan dibentuknya Komite Sekolah yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 dalam rangka memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipatif secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan

guna mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan. Secara rinci, pemebentukan Komite Sekolah memiliki tujuan (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah, (2) meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Selanjutnya, di dalam lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 telah dijabarkan fungsi Komite Sekolah yang terdiri atas tujuh butir. Ketujuh butir tersebut, adalah (1) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (2) melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu; (3) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; (4) memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan; (5) mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; (6) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan (7) melakukan

evaluasi dan pengawasan terhadap program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan peranan Komite Sekolah juga diatur secara jelas terkait standar tata kelola sekolah yang meliputi pengembangan standar isi terutama pengembangan KTSP, dan pengelolaan sekolah yang berkaitan dengan struktur organisasi satuan pendidikan, biaya operasional pendidikan, rencana kerja, dan pelaksanaan pengelolaan pendidikan. Terkait dengan pengembangan isi terutama yang berhubungan dengan pengembangan KTSP juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006.

Berdasarkan tujuan dan fungsi Komite Sekolah yang tergambar dari uraian di atas secara jelas tampak adanya peranan Komite Sekolah yang begitu penting terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Peranan Komite Sekolah secara ringkas memiliki empat peranan utama, yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, dan pengontrol serta mediator. Komite Sekolah berperanan sebagai pemberi pertimbangan sekolah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah. Komite Sekolah berperanan sebagai pendukung sekolah dalam aspek pendanaan (finansial), pemikiran, dan atau tenaga

dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Komite Sekolah berperan sebagai pengontrol sekolah dalam rangka mencapai kondisi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah. Komite Sekolah berperan sebagai mediator sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah antara masyarakat dengan pemerintah.

Tampaknya tujuan dan fungsi pembentukan Komite Sekolah yang kemudian melahirkan peranan Komite Sekolah yang tergambar di atas bila dapat dilaksanakan dan dicapai dunia ini begitu indah. Kenyataannya, belum tentu demikian. Justru kenyataan yang dihadapi yang kemudian menjadi masalah yang perlu dipertanyakan. Mengapa demikian? Kesan di masyarakat kehadiran Komite Sekolah yang menggantikan keberadaan BP3 dipandang memiliki fungsi dan peran yang sama, yaitu sebagai kepanjangan tangan sekolah untuk mendapatkan dana masyarakat (orang tua), sehingga lebih dipandang sebagai ganti nama saja. Kesiapan wawasan orang tua siswa sekolah (termasuk orang tua yang menjadi pengurus Komite Sekolah) terkait dengan permasalahan fungsi dan tujuan pembentukan Komite Sekolah yang masih perlu dikaji lagi. Misalnya, terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama pengembangan KTSP. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardan Suyanto, Zamzani, dan Kastam Syamsi (2006) menunjukkan bahwa Komite Sekolah menghadapi kendala yang paling tinggi terkait dengan penyusunan KTSP yang salah satu penyebabnya

Komite Sekolah belum memahami panduan dan acuan resmi terkait dengan penyusunan KTSP, apalagi menganalisisnya.

Sekarang, kenyataannya bagaimana peranan Komite Sekolah tersebut? Bila belum seperti yang diharapkan, belum mencapai standar yang digariskan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, kendala apa saja yang dihadapi? Upaya apa saja yang telah dilakukan? Dan pertanyaan lain yang semuanya perlu memperoleh jawaban yang akurat. Untuk menjawab permasalahan yang dipertanyakan di atas, tentulah diperlukan data yang empirik dan faktual sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait dengan permasalahan di atas.

B. Identifikasi Masalah

Keberadaan komite sekolah sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 dibentuk dalam rangka untuk mewadahi aspirasi masyarakat, meningkatkan peranserta masyarakat, serta menciptakan suasana demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran Komite Sekolah mengarah pada empat peran utama Komite Sekolah, yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, serta mediator.

Dalam hubungannya dengan implementasi KTSP, pada setiap tahap penyusunan, implementasi, serta evaluasi program KTSP, komite sekolah hendaknya dapat memfasilitasi, mendukung, dan mengakomodasi

sekolah melalui pemberian pertimbangan, dukungan dalam bentuk sumber daya yang diperlukan, pengkondisian akuntabilitas yang transparan, serta menjadi mediator antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah, sehingga tercipta hubungan yang sinergis dan kolaboratif di antara ketiga komponen tersebut.

Berdasarkan ketentuan mengenai peran dan fungsi Komite Sekolah tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi peran-peran Komite Sekolah dalam implementasi KTSP antara lain sebagai berikut.

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, pendukung, pengontrol, penengah, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, termasuk di dalamnya pengembangan KTSP.
- b. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- c. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- d. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di sekolah.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, penelitian ini akan difokuskan pada aktivitas manajemen sekolah yang pada saat ini sedang menjadi perhatian dan

pekerjaan besar sekolah, serta perlu segera diselesaikan. Hal tersebut adalah manajemen sekolah dalam rangka implementasi KTSP, yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, yang harus terjadi kebersamaan dan kolaborasi antara sekolah dengan komite sekolah. Untuk mempertajam hasil penelitian ini, perlu dikaji pula tentang kendala sekolah serta upaya-upaya yang telah dilakukan sekolah untuk memantapkan dan meningkatkan peran serta komite sekolah.

Oleh karena itu, Secara umum rumusan penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Bagaimanakah peranan Komite Sekolah pada Sekolah Dasar di daerah Istimewa Yogyakarta dalam implementasi KTSP? Bagaimanakah pemenuhan peranan Komite Sekolah sesuai standar nasional seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006, khususnya dalam implementasi KTSP?

Rumusan masalah tersebut selanjutnya secara spesifik dapat dirinci menjadi sebagai berikut.

1. Bagaimanakah peran Komite Sekolah dalam penyusunan KTSP di Sekolah Dasar?
2. Bagaimanakah peran Komite Sekolah dalam pelaksanaan KTSP di Sekolah Dasar?
3. Bagaimanakah peran Komite Sekolah dalam monitoring dan evaluasi KTSP di Sekolah Dasar?

4. Kendala apa saja yang dihadapi oleh sekolah dalam meningkatkan peran Komite Sekolah dalam penyusunan dan pelaksanaan KTSP?.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Komite Sekolah pada Sekolah Dasar di daerah Istimewa Yogyakarta dalam implementasi KTSP. Di samping itu juga untuk mengetahui pemenuhan peranan Komite Sekolah sesuai standar nasional seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006, khususnya dalam implementasi KTSP .

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Komite Sekolah di Sekolah Dasar dalam implementasi KTSP khususnya untuk aspek-aspek berikut.

1. Peran Komite Sekolah dalam penyusunan KTSP di Sekolah Dasar.
2. Peran Komite Sekolah dalam pelaksanaan KTSP di Sekolah Dasar.
3. Peran Komite Sekolah dalam monitoring dan evaluasi KTSP di Sekolah Dasar.
4. Kendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan oleh sekolah dalam meningkatkan peran Komite Sekolah dalam penyusunan dan pelaksanaan KTSP.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi lembaga terkait, antara lain para pengelola Sekolah Dasar, Komite Sekolah, dan Dinas Pendidikan, untuk menjadi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam upaya mengembangkan dan memantapkan peranan Komite Sekolah dalam rangka implementasi KTSP pada khususnya maupun secara umum dalam hal penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Sekolah

Pada pasal 51, Bab XIV Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, mengenai Pengelolaan Pendidikan, telah dinyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Lebih lanjut, dalam pasal 49, ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, juga ditegaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah, yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

Esensi dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah peningkatan otonomi sekolah, peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan peningkatan fleksibilitas (keluwesan) dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Otonomi diartikan sebagai kewenangan/ kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan tidak tergantung. Fleksibilitas dapat diartikan sebagai keluwesan-keluwesan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin guna meningkatkan mutu sekolah. Sedangkan peningkatan partisipasi yang dimaksud adalah penciptaan lingkungan

yang terbuka dan demokratik, di mana warga sekolah (guru, siswa, karyawan) dan warga masyarakat (orangtua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, usahawan dan sebagainya) didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan akuntabilitas.

Dengan kata lain, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah pola manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan secara partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, karyawan, orangtua siswa dan masyarakat) dalam rangka meningkatkan mutu sekolah dalam kerangka kebijakan nasional. Dengan demikian, MBS merupakan pola manajemen baru yang bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada sekolah (pengelola sekolah) untuk mengelola sekolah tersebut dalam rangka untuk meningkatkan mutu sekolahnya.

Tujuan penerapan pola manajemen MBS adalah untuk mewujudkan sekolah mandiri. Sekolah mandiri adalah sekolah yang mampu mengurus dirinya sendiri secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga sekolah lebih tanggap terhadap pengembangan dan kebutuhannya, yang ditunjang oleh kemampuan mengelola, dan didukung oleh adanya kerjasama dan partisipasi dari seluruh warga sekolah dan masyarakat.

Sekolah yang mandiri pada hakikatnya adalah sekolah yang

berdaya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dalam meningkatkan mutu pendidikan, dengan memberdayakan potensi dan partisipasi dari seluruh warga sekolah dan masyarakat. Mandiri yang dimaksud tentu saja didukung pula oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi dan menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumberdaya yang dimiliki, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaptif dan antisipatif, dan kemampuan bersinergi serta ber-kolaborasi.

Oswald (1995), menyatakan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah atau *School-Based Management* (SBM), merupakan salah satu strategi yang paling populer dalam upaya reformasi sekolah di Amerika Serikat di tahun 80-an. Selama lebih dari satu dekade, banyak sekolah di Amerika Serikat yang menerapkan metode SBM ini dalam pengelolaan: anggaran sekolah, kurikulum dan pengambilan keputusan di sekolah.

Banyak hasil penelitian yang menyatakan bahwa SBM memiliki banyak keunggulan dibanding pola manajemen yang lama, antara lain: (1) memberikan program yang lebih baik dalam pengembangan siswa, karena semua upaya diorientasikan pada siswa (*customer-driven*); (2) SBM menjamin kualitas keputusan yang lebih baik, karena keputusan dibuat secara bersama dengan melibatkan banyak pihak; dan (3) SBM akan meningkatkan komunikasi diantara *stake-holders*, termasuk dewan sekolah, pengawas, kepala sekolah, guru, orangtua siswa, anggota

masyarakat dan siswa.

Agar pelaksanaan SBM dapat meningkatkan keberhasilan belajar siswa, maka kepala sekolah harus mengambil keputusan secara tim atau dengan melibatkan banyak pihak seperti: guru, orangtua siswa dan masyarakat. Dengan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, maka guru akan memiliki sikap yang positif terhadap kepemimpinan di sekolah dan meningkat komitmennya terhadap pencapaian tujuan sekolah. Selain itu, dengan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, orangtua siswa dan anggota masyarakat yang lain akan memberikan dukungan penuh kepada sekolah dan merasa ikut memiliki sekolah.

B. Peran Serta Masyarakat

Sejalan dengan pemberlakuan Manajemen Berbasis Sekolah, maka salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam pelaksanaan MBS adalah adanya peningkatan partisipasi orangtua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pada Bab III, pasal 4 UU No. 20 tahun 2003, telah dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Selanjutnya, dalam pasal 54, lebih ditegaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam

penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

Sementara itu, pada pasal 56, ayat (1) telah dinyatakan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Lebih lanjut, pada ayat (3) dinyatakan bahwa Komite Sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Mekanisme peningkatan partisipasi masyarakat dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) melakukan dialog untuk merumuskan tujuan sekolah; (2) menciptakan hubungan yang baik antar partisipan; (3) harus mampu belajar dari pengalaman; (4) menjalin hubungan dengan lingkungan di luar sekolah; (5) menerapkan pendekatan belajar tuntas bagi siswa; dan (6) melibatkan semua partisipan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan inovasi dalam PBM ditempuh dengan cara: (1) menggunakan pendekatan pembelajaran *meaningful learning* (belajar bermakna); (2) pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran; (3) menggunakan pendekatan pembelajaran tuntas bagi semua siswa; dan (4) meningkatkan kualitas pelayanan kepada siswa secara terpadu.

Caplan (1998), menyatakan banyak hasil penelitian menunjukkan

bahwa keterlibatan orangtua di sekolah akan meningkatkan mutu hasil belajar siswa. Keterlibatan orangtua dalam belajar anak cenderung akan menghasilkan prestasi yang tinggi, meningkatkan tingkat kehadiran siswa di sekolah, kualitas hasil pekerjaan rumah yang lebih baik, serta sikap dan perilaku positif lainnya. Akan tetapi, untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut, para guru dan staf di sekolah harus mampu menciptakan kondisi dan iklim yang kondusif bagi keterlibatan orangtua di sekolah.

Di Indonesia, upaya pelibatan orangtua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebenarnya telah lama diupayakan. Namun keterlibatan tersebut masih sebatas dalam bentuk dukungan dana untuk penyelenggaraan pendidikan atau dukungan *input* (seperti: iuran BP-3, SPP, POMG dan sebagainya), dan sekedar untuk membantu serta menyediakan fasilitas belajar anak di rumah. Sementara itu, keterlibatan orangtua siswa dalam pengambilan keputusan tentang program-program sekolah, proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah, evaluasi dan akuntabilitas program sebagaimana yang diidealkan oleh konsep MBS hampir-hampir belum pernah dapat terealisasikan. Masih rendahnya kesadaran orangtua dan masyarakat mengenai arti penting keterlibatan mereka dalam pendidikan anak, rendahnya tingkat pendidikan orangtua, faktor budaya dan sikap orangtua yang cenderung mempercayakan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada sekolah, diduga akan menjadi kendala utama dalam upaya pelibatan orangtua dalam pendidikan anaknya di sekolah. Disamping itu, sikap sebagian administrator sekolah

dan guru, dan sikap serta keterbukaan pihak sekolah yang kurang mendukung, juga akan menjadi penyebab rendahnya keterlibatan orangtua dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan keterlibatan orangtua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan seperti yang diidealkan oleh konsep MBS nampaknya merupakan upaya yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan direalisasikan secara bertahap.

Sementara itu, Hoover-Dempsey and Sandler (1997), menyatakan bahwa banyak orang mengakui bahwa keterlibatan orangtua dalam pendidikan anaknya adalah sangat penting, dan mampu memberikan manfaat bagi proses belajar anak di sekolah. Namun pola-pola keterlibatan orangtua dalam membantu belajar anak di sekolah ternyata sangat variatif dan tergantung pada kondisi orangtua, penerimaan sekolah, dan sistem yang berlaku di sekolah serta budaya masyarakat. Disamping itu, pelibatan orangtua dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah ternyata bukanlah suatu upaya yang mudah dan akan banyak menghadapi kendala, terutama yang diakibatkan oleh kesadaran sebagian orangtua mengenai arti penting keterlibatan mereka dalam pendidikan di sekolah, dan sistem serta budaya sekolah yang kurang mendukung untuk melibatkan orangtua secara optimal.

Untuk mendukung keterlibatan orangtua (keluarga) di sekolah, harus dimulai dari administrator di sekolah (kepala sekolah). Mereka harus mempunyai keinginan untuk merekrut orangtua siswa dan anggota

masyarakat lainnya untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan, mau mendengarkan pandangan-pandangan mereka, dan memberikan kesempatan kepada orangtua untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah.

The National Network of Partnership Schools (1997), mengembangkan model pelibatan orangtua di sekolah, yaitu dalam bentuk: (1) peningkatan kemampuan orangtua dalam mengasuh/mendidik anak dan meningkatkan kemampuan sekolah untuk memahami kebutuhan orangtua; (2) mengembangkan komunikasi yang efektif antara sekolah dan keluarga; (3) menciptakan kondisi yang mampu melibatkan orangtua dalam program-program sekolah; (4) menciptakan kegiatan yang dapat melibatkan orangtua dalam belajar anak di rumah; (5) melibatkan orangtua dalam pengambilan keputusan, dan sebagai anggota Komite Sekolah; dan (6) berkolaborasi dengan orangtua dan masyarakat agar mampu memahami kebutuhan-kebutuhan mereka.

Disamping itu, Comuntzis-Page (1996) menyatakan bahwa orangtua akan bersedia terlibat jika mereka merasa bahwa iklim sekolah atau atmosfer di sekolah membuat mereka merasa dihormati, dipercaya, didengar dan dibutuhkan. Oleh karena itu, komunikasi yang harmonis antara sekolah dan orangtua siswa seperti: dalam bentuk komunikasi lewat telepon, laporan kemajuan belajar anak, konferensi dan kunjungan ke rumah, akan sangat membantu orangtua merasa lebih percaya diri, merasa nyaman berhubungan dengan sekolah, dan akan

cenderung mau melibatkan diri. Disamping itu, para guru dan staf di sekolah juga harus mampu menciptakan iklim atau suasana yang menunjukkan sikap terbuka, antusias dan dapat memahami perbedaan diantara siswa dan menghargai perbedaan diantara para orangtua.

Dalam hal ini, Comuntzis-Page (1996) mengajukan strategi untuk meningkatkan keterlibatan orangtua dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yaitu dengan cara sebagai berikut:

- (1) Membantu orangtua dalam memahami perkembangan anak dan keterampilan atau kemampuan untuk mendidik anak.
- (2) Menciptakan berbagai pola keterlibatan orangtua di sekolah sesuai dengan kondisi masing-masing orangtua.
- (3) Melakukan komunikasi secara periodik dengan orangtua siswa dalam berbagai cara, sehingga mereka tetap dapat mengikuti perkembangan belajar anak dan kegiatan sekolah.
- (4) Mengakomodasi keterbatasan waktu yang dimiliki oleh orangtua untuk dapat melibatkan diri dalam membantu belajar anak.
- (5) Berusaha memahami berbagai kondisi yang berkaitan dengan latar belakang etnis, budaya dan sosial-ekonomi orangtua.
- (6) Buatlah kondisi yang membuat orangtua merasa diterima di sekolah dengan memberikan kesempatan kepada orangtua untuk mengunjungi sekolah, berkunjung di kelas, dan memberikan umpan balik.
- (7) Libatkan orangtua dalam pengambilan keputusan di sekolah seperti: dilibatkan dalam Komite Sekolah, penasehat sekolah dan sebagainya.

Sediono dkk. (2003), telah mengidentifikasi jenis-jenis peran serta masyarakat, termasuk orangtua/wali murid, dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dari berbagai peran serta masyarakat tersebut dapat diklasifikasikan dari peran serta pada tingkatan yang terendah sampai tingkatan tertinggi, yaitu dari hanya sekedar menggunakan jasa pelayanan yang disediakan oleh sekolah sampai keikut-sertaannya dalam pengambilan keputusan pada berbagai jenjang. Secara rinci, jenis-jenis peran serta masyarakat, termasuk orangtua/wali murid, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Peran serta pada tingkatan terendah adalah hanya menggunakan jasa pelayanan yang disediakan oleh sekolah, misalnya: masyarakat mau menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut.
- 2) Peran serta orangtua/wali murid dan masyarakat dengan cara memberikan kontribusi baik dana, bahan maupun tenaga, sebagai misal: membantu pembangunan gedung sekolah atau pengadaan fasilitas pendidikan yang lain, dengan dana, barang ataupun tenaga mereka.
- 3) Peran serta dalam bentuk menerima secara pasif apa yang telah diputuskan oleh pihak sekolah, atau sekolah bersama-sama dengan komite sekolah, misalnya: orangtua/wali murid menerima apa yang telah diputuskan oleh Komite Sekolah bersama-sama dengan sekolah mengenai besarnya iuran yang harus mereka bayar.

- 4) Peran serta melalui adanya konsultasi mengenai hal-hal tertentu, sebagai misal: Kepala Sekolah membahas mengenai masalah perbaikan pembelajaran bersama dengan komite sekolah dan orangtua siswa.
- 5) Keterlibatan dalam memberikan pelayanan tertentu, misalnya: Komite Sekolah dan orangtua/wali murid mewakili sekolah bersama dengan Puskesmas setempat mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai masalah-masalah kesehatan dan gizi anak.
- 6) Keterlibatan sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasikan oleh sekolah, sebagai misal: sekolah meminta bantuan kepada Komite Sekolah dan orangtua/wali murid tertentu untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum mengenai masalah-masalah pendidikan.
- 7) Peran serta dalam pengambilan keputusan, misalnya: orangtua/wali murid ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan mengenai rencana kegiatan atau program-program sekolah serta konsekuensi pendanaannya.

Dalam kenyataannya, sampai saat ini peran serta orangtua/wali murid dan masyarakat pada umumnya baru sampai pada kategori ketiga, yaitu masih sebatas menerima secara pasif apa yang telah diputuskan oleh pihak sekolah atau sekolah bersama-sama dengan komite sekolah. Disamping itu, pada umumnya pelibatan orangtua/wali murid dan masyarakat lebih banyak berkaitan dengan masalah pengadaan sarana

dan prasarana pendidikan serta pengadaan dana untuk itu. Orangtua/wali murid dan masyarakat pada umumnya diposisikan hanya dalam fungsi pengadaan dana dan bantuan sarana pendidikan. Padahal dalam konsep MBS, keikutsertaan masyarakat bisa lebih dari itu, karena orangtua/wali murid dan masyarakat sebetulnya dapat dilibatkan dalam bidang akademik dan kegiatan pembelajaran di kelas.

Untuk saat ini, peran serta orangtua/wali murid dan masyarakat sudah dianggap baik jika dapat terlibat dalam pengelolaan sekolah, sebagai misal ikut bermusyawarah dalam merencanakan kegiatan atau program-program sekolah beserta pendanaannya. Namun mereka mestinya tidak hanya disodori sebuah rencana yang sudah final, sehingga kesan keterlibatan orangtua/wali murid dan masyarakat seolah-olah hanya sekedar 'basa-basi' atau sebagai 'tukang stempel' saja.

Disamping itu, juga dimungkinkan orangtua/wali murid dan masyarakat ikut memikirkan mengenai kebutuhan sekolah yang terkait dengan pembelajaran, misalnya: masalah penambahan tenaga guru yang tidak ada atau masih kurang, atau ikut menjadi guru pengganti. Orangtua/wali murid dan masyarakat sebenarnya juga dapat dilibatkan untuk menjadi 'tenaga guru' untuk bidang studi atau mata pelajaran tertentu, seperti: kesenian, olah raga, agama atau mata pelajaran lainnya. Demikian pula, sebagian dari orangtua/wali murid dan masyarakat juga dapat diminta bantuannya untuk ikut membina kegiatan ekstra kurikuler seperti: Pramuka, TPA, Pesantren Kilat dan sebagainya.

Idealnya, peran serta orangtua/wali murid dan masyarakat dapat masuk dalam bidang-bidang akademik. Mereka dapat ambil bagian dalam pembahasan mengenai pelaksanaan KBM, kinerja guru, prestasi belajar siswa, upaya-upaya perbaikan mutu sekolah dan menggali berbagai sumber dana untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Bahkan jika dimungkinkan, orangtua/ wali murid dan masyarakat dapat juga untuk dilibatkan dalam menilai kinerja guru, memilih dan mengangkat guru baru serta member-hentikan para guru yang tidak berkompeten. Untuk saat ini, keterlibatan orangtua/wali murid dan masyarakat pada masalah yang terakhir ini nampaknya belum memungkinkan, karena pengangkatan, pemberhentian dan penggantian guru-guru pada sekolah negeri (atau guru yang berstatus sebagai PNS) masih menjadi kewenangan pemerintah daerah.

C. Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Mutu sekolah, menurut Arcaro (1995: 56), merupakan upaya menciptakan kondisi di mana pendidik, orang tua, perangkat pemerintah, tokoh masyarakat, dan pelaku bisnis bekerja bersama-sama untuk membantu siswa dengan sumber-sumber yang mereka perlukan untuk menjawab tantangan siswa dalam bidang akademik, bisnis, dan sosial pada saat ini maupun yang akan datang. Peranan komponen pendidikan di sekolah dalam manajemen mutu terpadu mengalami pergeseran jika disejajarkan dengan ketika sekolah belum menerapkan

manajemen mutu terpadu. Berikut tabel perbandingan peranan komponen sekolah antara manajemen pendidikan tradisional dan manajemen mutu terpadu pendidikan.

Pergeseran Peran Komponen Sekolah

Komponen Sekolah	Pendidikan Tradisional	Mutu Terpadu Pendidikan
Orang tua	Mencampuri dan reaktif harid di sekolah	Melayani guru
Siswa/Pelajar	Hadir di sekolah	Penelitian, penemuan, kebutuhan/tuntutan, dan melayani
Guru	Mengajar, mengawasi semuanya	Membimbing dan mengajar murid
Kepala sekolah	Mengawasi, memerintah, mengorganisasi, merencanakan	Menjauhkan rintangan, merencanakan dan mengorganisasi
Tenaga Administrasi	Memantau pelaksanaan kebijakan dan mendukung sekolah	Tindakan sebagai sumber, menghindari rintangan
Komite sekolah	Membuat kebijakan	Memimpin
Masyarakat	Memilih dewan dan menyediakan sumber daya	Mengidentifikasi kebutuhan dan menyediakan sumber daya

Sumber: Joseph C. Fields, Total Quality For Schools, Wisconsin: ASQC, Quality Press, 1994.

Komite sekolah pada manajemen mutu terpadu tidak sekedar membuat kebijakan, namun harus berperan aktif dalam hal memimpin sekolah. Hal ini bermakna bahwa secara implisit posisi komite sekolah sejajar dengan kepala sekolah dalam menentukan kebijakan dan memimpin sekolah. Dengan demikian, kebijakan yang berkenaan fungsi-fungsi yang didesentralisasikan ke sekolah, termasuk kurikulum yang

digunakan sekolah juga tidak lepas dari tanggung jawab komite sekolah.

Keberadaan komite sekolah diatur di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Pertimbangan utama dibentuk komite sekolah adalah perlunya dukungan dan peranserta masyarakat yang lebih optimal dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan. Pada pasal 1 dan 3 Kepmendiknas tersebut, ditekankan bahwa pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dibentuk komite sekolah atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan dan/atau pemerintah kabupaten/kota, sehingga Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) tidak berlaku. Hal ini secara implisit berarti bahwa masyarakatlah yang memiliki peran utama untuk membentuk komite sekolah pada sekolah di lingkungannya.

Secara definitif, komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah. Secara organisatoris, Komite Sekolah bersifat mandiri (*independent*), tidak mempunyai hubungan hierarkhis dengan lembaga pemerintahan. Dengan demikian, kedudukan Komite Sekolah secara praktis kuat, mandiri, dan memungkinkan memiliki posisi yang sejajar dengan sekolah yang didukungnya.

Tujuan dibentuknya Komite Sekolah secara umum untuk mewadahi

aspirasi masyarakat, meningkatkan peranserta masyarakat, serta menciptakan suasana demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara rinci tujuan Komite Sekolah adalah sebagai berikut.

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Secara jelas, di dalam lampiran SK Mendiknas No. 044/U/2002, dijabarkan juga mengenai fungsi Komite Sekolah, yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Masyarakat dalam konteks ini dapat mencakup perorangan, organisasi, dunia usaha, maupun dunia industri.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a. kebijakan dan program pendidikan;

- b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c. kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d. kriteria tenaga kependidikan;
 - e. kriteria fasilitas pendidikan dan;
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di sekolah.

Sesuai dengan tujuan dan fungsi dibentuknya Komite Sekolah, maka peran Komite Sekolah mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Terdapat empat peran utama Komite Sekolah, yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, serta mediator. Komite Sekolah berperan sebagai pemberi pertimbangan atau *advisory agency* bagi sekolah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah. Dukungan yang dapat diberikan oleh komite sekolah dalam perannya sebagai pendukung (*supporting agency*), dapat berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Komite Sekolah menjadi pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka untuk mencapai kondisi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan output pendidikan di sekolah. Di sisi lain, Komite

Sekolah juga berperan sebagai penghubung atau penengah (*mediator*) antara masyarakat dengan pemerintah (*eksekutif*) untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Dalam hubungannya dengan implementasi KTSP dan pengelolaan sekolah, senantiasa empat peran Komite Sekolah menjadi tumpuan tersusunnya dan terlaksananya KTSP dan terselenggaranya pengelolaan sekolah secara optimal dan produktif. Pada setiap tahap penyusunan, implementasi, serta evaluasi program KTSP komite sekolah hendaknya dapat memfasilitasi, mendukung, dan mengakomodasi sekolah melalui pemberian pertimbangan, pendukung (*supporting agency*) dalam bentuk sumber daya yang diperlukan, pengkondisian akuntabilitas yang transparan, serta menjadi mediator antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah, sehingga tercipta hubungan yang sinergis dan kolaboratif di antara ketiga komponen tersebut.

Peran Komite Sekolah yang berkenaan dengan pengembangan kurikulum sekolah dan pengelolaan sekolah telah ditegaskan dalam PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 51, 52, 53, dan 54. Secara lengkap isi pasal dan ayat disajikan sebagai berikut.

Pasal 51 ayat 2 dan 3 berbunyi “ Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang non-akademik dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan”; dan “Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat

yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan”.

Pasal 52 yang berhubungan dengan struktur organisasi satuan pendidikan dan biaya operasional satuan pendidikan diputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan, sedangkan tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelah mempertimbangkan masukan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.

Pasal 53 ayat 1 menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun. Selanjutnya pada ayat 2 memuat rencana kerja tahunan pada pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
- b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
- c. mata pelajaran yang ditawarkan pada semester gasal dan semester genap;
- d. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;

- e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
- f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
- h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
- i. jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite pendidikan tinggi;
- j. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;
- k. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.

Khususnya untuk pengelolaan pendidikan dasar dan menengah, ditekankan pada ayat 3 pasal 53 bahwa rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.

Pasal 54 ayat 2 dan 4 mengatur pelaksanaan pengelolaan sekolah sebagai berikut. Ayat 2 menegaskan “Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

52 harus mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah”, sedangkan ayat 4 menggariskan “Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah”.

Tuntutan peran Komite Sekolah yang makin menjadi tumpuan hidup-matinya sekolah, berdampak pada beberapa aspek lain yang terkait. Aspek-aspek tersebut antara lain berkenaan dengan rekrutmen dan pemilihan personalia yang duduk dalam pengurus dan anggota Komite Sekolah, pembinaan Komite Sekolah, serta kompensasi bagi Komite Sekolah agar ada keseimbangan antara kewajiban dan hak mereka.

Dilihat dari komponen yang harus ada di dalam organisasi komite sekolah, sebagian besar adalah unsur masyarakat, sedangkan unsur dari sekolah sangat kecil. Unsur masyarakat tersebut, dapat berasal dari orang tua/wali siswa, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha atau industri, organisasi profesi tenaga pendidikan, wakil alumni, wakil siswa, serta Badan Pertimbangan Desa. Dewan guru dari sekolah dan pihak yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah. Dengan demikian, masyarakat secara langsung maupun tidak langsung memiliki hak pula dalam menetapkan kebijakan pendidikan di sekolah. Tentu saja melalui prosedur yang semestinya, yaitu melalui Komite Sekolah. Suara

masyarakat hendaknya diakomodasi oleh Komite Sekolah kemudian diteruskan ke sekolah dan/atau pemerintah, demi kemajuan, perbaikan, atau yang lebih luas ke arah peningkatan mutu sekolah secara total.

Dalam kaitannya dengan implementasi KTSP, sesuai hakikat KTSP sebagai bentuk pemberdayaan dan pemberian kewenangan sepenuhnya kepada sekolah untuk menentukan nasibnya sendiri dan agar KTSP dapat tersusun dan terlaksana secara efektif dan optimal, maka sekolah perlu membentuk kelompok kerja (*teamwork*) secara tegas dan jelas tugas dan tanggung jawabnya. Mengingat begitu pentingnya kerja sama tim dalam upaya mencapai peningkatan mutu sekolah, maka perlu diperhatikan beberapa langkah yang harus dilalui dalam membentuk tim kerja perbaikan mutu sekolah. Menurut Tuckman (1985) terdapat empat langkah dalam pembentukan *teamwork* agar efektif (West-Burnham, 1997: 143), yaitu: (1) membentuk tim dari berbagai komponen terlibat, (2) analisis tugas untuk mencapai titik temu kebersamaan tim, dilanjutkan dengan pembagian tugas; (3) menetapkan aturan kerja tim, termasuk di dalamnya antara lain ketentuan, cara, dan waktu kerja, batas waktu penyelesaian tugas bagi setiap anggota, serta tugas akhir, dan (4) tim mulai melakukan pekerjaan, dengan memperhatikan tata laksana kerja sama yang baik antaranggota. *Teamwork* tersebut beranggotakan semua komponen yang harus terlibat di dalam penyusunan, pelaksanaan, maupun evaluasi KTSP. Komponen-komponen sekolah yang diharapkan dapat direkrut dalam *teamwork* tersebut antara

lain Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah, Karyawan, dan jika mungkin meluas ke unsur masyarakat yang dipandang perlu namun belum masuk di Komite Sekolah. Dalam melaksanakan tugas dan kerjanya, *teamwork* tersebut dibina sampai menjadi *teamwork* yang kompak, cerdas, antisipatif, dan kreatif, hingga mampu menghasilkan KTSP yang memiliki relevansi, efisiensi, efektivitas, serta sustainabilitas yang tinggi.

D. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Secara definitif, KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri atas tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan KTSP, kalender pendidikan, dan silabus. Prinsip pengembangan KTSP secara umum harus berdasar pada kepentingan peserta didik, keragaman kultur dan latar belakang lingkungan masyarakat, serta berkelanjutan. Secara rinci, KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
2. Memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak deskriminatif terhadap perbedaan yang ada.
3. Relevan dengan kebutuhan hidup peserta didik, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja.

4. Diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan siswa agar mampu dan mau belajar sepanjang hayat.
5. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
6. Menyeluruh dalam cakupan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.
7. Memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan KTSP, maka muatan KTSP mencakup lima kelompok mata pelajaran, yaitu: (1) agama dan akhlak mulia, (2) kewarganegaraan dan kepribadian, (3) ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) estetika, dan (5) jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Aspek yang juga penting dalam pengembangan KTSP adalah pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk setiap mata pelajaran dan/atau tema. Pengembangan silabus dan RPP ini pada dasarnya menjadi tanggung jawab guru secara penuh, yang dapat dilakukan secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru (PKG). Silabus dapat disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah dan lingkungannya. Apabila syarat

tersebut belum dapat dipenuhi oleh para guru, maka pihak sekolah hendaknya memfasilitasi pengembangan silabus dengan cara membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk menyusun silabus, baik untuk di internal sekolah maupun di MPGM atau PKG.

Tahap-tahap yang ditempuh oleh sekolah dalam penyusunan KTSP, secara garis besar ada tiga langkah, yaitu: penyusunan draf, revisi draf, dan finalisasi draf KTSP. Tahap penyusunan draf KTSP dilaksanakan bersama antara guru dan kepala sekolah. Tahap selanjutnya adalah merevisi draf KTSP tersebut melalui rapat kerja sekolah yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan karyawan. Setelah revisi draf selesai, selanjutnya dilakukan finalisasi KTSP dengan melibatkan Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, Komite Sekolah, Pengawas, Kepala Cabang Dinas Pendidikan tingkat kecamatan, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa KTSP mengedepankan pengembangan potensi peserta didik yang berbasis kondisi dan kemampuan sekolah maupun masyarakat sekitar. Hal ini ditunjukkan antara lain bahwa Komite Sekolah harus terlibat bahkan harus berperan aktif di dalam penyusunan KTSP.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian suvei tentang peran Komite Sekolah sekolah dasar di DIY dengan responden kepala sekolah, guru, dan pengurus Komite Sekolah.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lima kabupaten/kota di Propinsi DIY, dengan kancah penelitian sekolah dasar-sekolah dasar. Penelitian ini direncanakan terlaksana selama 4 (empat) bulan efektif, yang dimulai bulan September hingga Desember 2007.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh SD di DIY. Sampel penelitian ini ditentukan dengan *teknik quota sampling* sebanyak 48 sekolah dasar. Responden penelitian ini terdiri atas kepala sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Meski penelitian ini mengenai peranan komite sekolah, namun kepala sekolah dan guru dijadikan responden dalam rangka untuk keperluan *crosscheck* data dan pengungkapan kendala yang dihadapi sekolah terkait dengan peran Komite Sekolah. Pada tahap pertama, sampling wilayah: dari lima wilayah kabupaten/kota di DIY diambil dua wilayah (1 kota dan 1 kabupaten). Kabupaten Kulon Progo ditetapkan

sebagai sampel penelitian di samping kota Yogyakarta. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan variabilitas, heterogenitas, dan kewilayahan. Tahap kedua, adalah menetapkan atau memilih wilayah sekolah sampel. Untuk memenuhi kuota 48 sekolah dasar negeri, ditetapkan 24 sekolah kota Yogyakarta, dan 24 sekolah Kabupaten Kulon Progo. Untuk menetapkan sampel sekolah di wilayah Kota Yogyakarta didasarkan pada sebaran UPT Dinas Pendidikan dan Pengajaran, dan untuk wilayah Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada sebaran Cabang Dinas Pendidikan kecamatan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan metode angket. Oleh karena itu, instrumen yang akan dikembangkan adalah kuesioner untuk mengungkap peran komite sekolah dalam implementasi KTSP. Di samping itu, untuk melengkapi data serta untuk validasi, juga dilakukan *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan semua komponen responden penelitian (kepala sekolah, guru, komite sekolah). Semua proses pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dibantu oleh mahasiswa (dalam hal ini adalah mahasiswa yang sedang menulis skripsi yang terlibat dalam *research grant* ini - bersamaan mereka mengambil data di lapangan untuk skripsinya).

E. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan menurut jenisnya, dan dianalisis sesuai dengan jenis datanya. Sebagian besar data penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif baik dengan presentase maupun tabulasi silang. Beberapa data yang menunjukkan kekhususan akan dianalisis secara kualitatif, khususnya untuk kendala yang dihadapi dan upaya mengatasinya yang telah dilakukan oleh sekolah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Setting Penelitian

Penelitian ini dikenakan kepada Komite Sekolah di SD dengan sumber data Ketua Komite Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru SD di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo. Ketua Komite Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru tersebut berasal dari sekolah yang sama. Sekolah yang menjadi sampel sebanyak 48 sekolah negeri, terdiri atas 24 sekolah dari Kota Yogyakarta dan 24 sekolah dari Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena masing-masing sekolah diwakili 3 orang, maka total responden ada 144 orang.

Dari 144 orang tersebut, setelah diberi angket, yang mengembalikan ada 42 sekolah (20 dari Kota Yogyakarta dan 22 dari Kabupaten Kulon Progo), sehingga terkumpul 126 angket (60 dari Kota Yogyakarta dan 66 dari Kabupaten Kulon Progo). Analisis dan pembahasan dalam penelitian ini selanjutnya mendasarkan pada informasi dari 126 angket yang terkumpul tersebut.

B. Tahap Persiapan Implementasi KTSP di SD

Pada tahap persiapan implementasi KTSP mencakup kegiatan-kegiatan: sosialisasi KTSP di sekolah, lokakarya di sekolah, pembentukan kelompok kerja, serta penyiapan pedoman dan dokumen yang diperlukan.

Tabel 1. Sosialisasi KTSP Kepada Semua Warga Sekolah

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	2	3,4	32	48,3
2.	Mendukung	34	57,6		
3.	Mengontrol				
4.	Menjadi mediator				
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	7	11,9	22	33,3
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol				
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator			1	1,5
8.	Mendukung & mengontrol	2	3,4		
9.	Mendukung & menjadi mediator	8	13,6	2	3,0
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	3	5,1	1	1,5
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator			6	9,1
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator	3	5,1	2	3,0
	Jumlah				

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil makna bahwa pada dasarnya Komite Sekolah melaksanakan empat perannya, namun cenderung pada peran mendukung dan memberi pertimbangan terhadap pelaksanaan sosialisasi KTSP kepada semua warga sekolah. Komite Sekolah di Kota Yogyakarta, sebanyak 96,7% responden menyatakan mendukung, sedangkan di Kabupaten Kulon Progo, sebanyak 97% menyatakan memberi pertimbangan pelaksanaan sosialisasi KTSP tersebut.

Tabel 2. Lokakarya Tingkat Sekolah untuk Mempersiapkan Implementasi KTSP

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	8	13,6	11	16,6
2.	Mendukung	33	55,9	30	46,2
3.	Mengontrol				
4.	Menjadi mediator	1	1,7		
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	8	13,6	19	29,2
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol				
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator	1	1,7		
8.	Mendukung & mengontrol	3	5,1	1	1,5
9.	Mendukung & menjadi mediator	4	6,8	1	1,5
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol				
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator	1	1,7	2	3,1
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator			1	1,5
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
	Jumlah				

Tabel di atas menggambarkan bahwa Komite Sekolah cenderung mendukung pelaksanaan lokakarya untuk mempersiapkan implementasi KTSP. Kondisi di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa 87% menyatakan mendukung, demikian pula di Kabupaten Kulon Progo, sebanyak 81,9% menyatakan bahwa Komite sekolah mendukung pelaksanaan lokakarya.

Tabel 3. Pembentukan Kelompok Kerja (*Teamwork*) Penyusun KTSP di Sekolah

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	10	16,9	12	18,5
2.	Mendukung	31	52,5	32	49,2
3.	Mengontrol				
4.	Menjadi mediator	3	5,1	2	3,1
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	7	11,9	14	21,5
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol	1	1,7		
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator				
8.	Mendukung & mengontrol	3	5,1	1	1,5
9.	Mendukung & menjadi mediator	3	5,1	1	1,5
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	1	1,7	1	1,5
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator				
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator			1	1,5
	Jumlah				

Pembentukan kelompok kerja yang akan bertugas menyusun KTSP mendapat dukungan dari Komite Sekolah. Hal ini ditunjukkan sebanyak 77,1% responden di Kota Yogyakarta menyatakan bahwa Komite Sekolah mendukung, dan 78,4% responden dari Kabupaten Kulon Progo juga mendukung dalam pembentukan *teamwork*.

Tabel 4. Penyiapan Panduan atau Pedoman Penyusunan KTSP

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	5	8,6	8	12,5
2.	Mendukung	37	63,8	42	65,6
3.	Mengontrol	2	3,4	1	1,6
4.	Menjadi mediator	3	5,2		
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	6	10,3	9	14,1
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol	2	3,4	1	1,6
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator				
8.	Mendukung & mengontrol	1	1,7	1	1,6
9.	Mendukung & menjadi mediator			1	1,6
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	2	3,4	1	1,6
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator				
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
	Jumlah				

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa Komite Sekolah mendukung sekolah dalam penyiapan panduan atau pedoman penyusunan KTSP.

Tabel 5. Penyiapan Dokumen Berkenaan dengan Kurikulum yang Pernah Dimiliki oleh Sekolah

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	10	16,9	12	18,5
2.	Mendukung	35	59,3	40	61,5
3.	Mengontrol	6	10,2	2	3,1
4.	Menjadi mediator				
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	3	5,1	7	10,8
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol	3	5,1		
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator				
8.	Mendukung & mengontrol	1	1,7	2	3,1
9.	Mendukung & menjadi mediator				
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	1	1,7	2	3,1
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator				
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
	Jumlah				

Penyiapan dokumen yang berkenaan dengan kurikulum yang pernah dimiliki sekolah untuk mempersiapkan implementasi KTSP mendapat dukungan cukup kuat dari Komite Sekolah, baik di Kota Yogyakarta maupun di Kabupaten Kulon Progo. Sebanyak 68,8% responden di Kota Yogyakarta menyatakan bahwa Komite Sekolah mendukung penyiapan dokumen; bahkan di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 78,4% responden menyatakan bahwa Komite Sekolah mendukung.

Tabel 6. Penyiapan Dokumen-dokumen Sekolah Lainnya

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	12	20,3	4	6,2
2.	Mendukung	24	40,7	26	40,0
3.	Mengontrol	3	5,1	2	3,1
4.	Menjadi mediator			1	1,5
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	9	15,3	19	29,2
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol				
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator	1	1,7	2	3,1
8.	Mendukung & mengontrol	4	6,8	1	1,5
9.	Mendukung & menjadi mediator	1	1,7	3	4,6
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	1	1,7	5	7,7
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator	1	1,7		
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator	3	5,1	2	3,1
	Jumlah				

Penyiapan dokumen-dokumen lain penunjang persiapan implementasi KTSP juga mendapat dukungan dari Komite Sekolah baik di Kota Yogyakarta (72,9%) maupun di Kabupaten Kulon Progo (86,1%).

Berdasarkan kajian di atas dapat ditegaskan bahwa peran komite sekolah yang menonjol dalam langkah persiapan implementasi KTSP di SD adalah sebatas pada peran memberi dukungan dan memberikan pertimbangan.

C. Tahap Penyusunan KTSP di SD

Tabel 7. Penyusunan draf KTSP oleh Sekolah

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	16	28,1	25	38,5
2.	Mendukung	23	40,4	18	27,7
3.	Mengontrol				
4.	Menjadi mediator	1	1,8	1	1,5
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	10	17,5	16	24,6
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol				
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator	1	1,8		
8.	Mendukung & mengontrol	2	3,5	1	1,5
9.	Mendukung & menjadi mediator				
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	3	5,3	1	1,5
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator	1	1,8	2	3,1
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator			1	3,1
	Jumlah				

Dalam penyusunan draf KTSP, Komite Sekolah di Kota Yogyakarta mendukung (68,5%), sedangkan di Kabupaten Kulon Progo lebih pada memberi pertimbangan (70,8%).

Tabel 8. Pembahasan I draf KTSP oleh Sekolah

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	18	32,7	24	38,1
2.	Mendukung	18	32,7	16	25,4
3.	Mengontrol	3	5,5	2	3,2
4.	Menjadi mediator	2	3,6		
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	6	10,9	13	30,6
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol			2	3,2
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator	2	3,6	2	3,2
8.	Mendukung & mengontrol			2	3,2
9.	Mendukung & menjadi mediator	2	3,6		
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	3	5,5	2	3,2
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator	1	1,8		
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
	Jumlah				

Tabel di atas menunjukkan bahwa peran Komite Sekolah dalam pembahasan I draf KTSP cenderung banyak memberi pertimbangan. Di Kota Yogyakarta, sebanyak 54,5% menyatakan bahwa Komite Sekolah memberi pertimbangan, bahkan di Kabupaten Kulon Progo ada 78,3% responden yang menyatakan bahwa Komite Sekolah memberi pertimbangan dalam pembahasan draf I tersebut.

Tabel 9. Revisi draf KTSP oleh Sekolah

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	17	30,9	15	23,8
2.	Mendukung	19	34,5	25	39,7
3.	Mengontrol	7	12,7	7	11,1
4.	Menjadi mediator			1	1,6
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	5	9,1	5	7,9
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol	4	7,3	3	4,8
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator				
8.	Mendukung & mengontrol			3	4,8
9.	Mendukung & menjadi mediator				
10.	Mengontrol & menjadi mediator			1	1,6
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	3	5,5	3	4,8
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator				
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
	Jumlah				

Peran Komite Sekolah dalam kegiatan revisi draf KTSP, untuk di Kota Yogyakarta cenderung memberi pertimbangan (52,8%), sedang di Kabupaten Kulon Progo lebih pada memberi dukungan (57,2%) kegiatan tersebut.

Tabel 10. Pembahasan II draf KTSP oleh Sekolah

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	9	17,3	16	27,1
2.	Mendukung	25	48,1	22	37,3
3.	Mengontrol	3	5,8	2	3,4
4.	Menjadi mediator	4	7,7	2	3,4
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	5	9,6	12	20,3
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol	1	1,9		
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator	2	3,8		
8.	Mendukung & mengontrol	2	3,8	4	6,8
9.	Mendukung & menjadi mediator				
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	1	1,9	1	1,7
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator				
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
	Jumlah				

Berbeda dengan pembahasan I draf, dalam pembahasan II draf KTSP, peran Komite Sekolah lebih pada mendukung kegiatan tersebut. Sebanyak 63,4% responden di Kota Yogyakarta dan 66,1% responden di Kabupaten Kulon Progo menyatakan bahwa Komite Sekolah mendukung kegiatan pembahasan draf II KTSP.

Tabel 11. Finalisasi KTSP

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	7	12,3	8	13,1
2.	Mendukung	30	52,6	37	60,7
3.	Mengontrol	5	8,8	5	8,2
4.	Menjadi mediator	3	5,3		
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	6	10,5	7	11,5
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol				
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator				
8.	Mendukung & mengontrol	3	5,3	4	6,6
9.	Mendukung & menjadi mediator	2	3,5		
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	1	1,8		
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator				
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
	Jumlah				

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa peran Komite Sekolah dalam finalisasi KTSP cenderung memberi dukungan kepada sekolah. Hal ini ditunjukkan oleh sebanyak 73,7% responden di Kota Yogyakarta dan 78,8% responden di Kabupaten Kulon Progo menyatakan bahwa Komite Sekolah mendukung finalisasi draf KTSP.

Tabel 12. Pengesahan KTSP di Tingkat sekolah

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	8	14,0	2	3,2
2.	Mendukung	34	59,6	43	68,3
3.	Mengontrol			5	7,9
4.	Menjadi mediator			1	1,6
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	9	15,8	7	11,1
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol	1	1,8		
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator	1	1,8		
8.	Mendukung & mengontrol	2	3,5	3	4,8
9.	Mendukung & menjadi mediator	1	1,8		
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	1	1,8	2	3,2
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator				
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
	Jumlah				

Komite sekolah di Kota Yogyakarta maupun di Kabupaten Kulon Progo mendukung pengesahan KTSP di tingkat sekolah. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan persentase jawaban responden yang mengarah pada peran mendukung.

Tabel 13. Pengesahan KTSP di tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	2	3,5	1	1,6
2.	Mendukung	42	73,5	56	90,3
3.	Mengontrol	1	1,8	1	1,6
4.	Menjadi mediator	5	8,8		
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	2	3,5	1	1,6
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol	2	3,5		
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator				
8.	Mendukung & mengontrol			3	4,8
9.	Mendukung & menjadi mediator	1	1,8		
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	2	3,5		
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator				
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
	Jumlah				

Dukungan Komite Sekolah terhadap pengesahan KTSP di tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota lebih kuat dibanding di tingkat sekolah. Sebagian besar bahkan hampir semua responden menyatakan bahwa Komite sekolah mendukung proses pengesahan KTSP di tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Tabel 14. Sosialisasi KTSP di Sekolah untuk Diimplementasikan

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	2	3,8	3	4,6
2.	Mendukung	29	54,7	35	53,8
3.	Mengontrol			4	6,2
4.	Menjadi mediator	8	15,1	4	6,2
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	2	3,8	8	12,3
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol				
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator			2	3,1
8.	Mendukung & mengontrol				
9.	Mendukung & menjadi mediator	8	15,1	4	6,2
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	2	3,8	2	3,1
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator				
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator	1	1,9		
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator	1	1,9	3	4,6
	Jumlah				

Kegiatan sosialisasi KTSP yang sudah disyahkan kepada semua warga sekolah mendapat dukungan dari Komite Sekolah. Bahkan di Kota Yogyakarta ada Komite Sekolah yang menjadi mediator dalam rangka sosialisasi tersebut.

Berdasarkan uraian peran komite sekolah dari beberapa sub aspek dalam tahap penyusunan KTSP dapat diambil makna bahwa peran yang paling banyak dilakukan oleh Komite Sekolah dalam Tahap Penyusunan KTSP adalah memberikan dukungan kepada sekolah, kecuali pada saat pembahasan I draf KTSP, Komite Sekolah lebih banyak memberikan

pertimbangan.

D. Tahap Pelaksanaan KTSP

Tabel 15. Penjadwalan Kegiatan Kurikuler

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	15	25,9	16	24,6
2.	Mendukung	29	50,0	23	35,4
3.	Mengontrol	1	1,7	4	6,2
4.	Menjadi mediator				
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	4	6,9	18	27,7
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol	1	1,7		
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator	1	1,7		
8.	Mendukung & mengontrol	2	3,4	2	3,1
9.	Mendukung & menjadi mediator	1	1,7		
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	3	5,2	1	1,5
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator				
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator	1	1,7	1	1,5
	Jumlah				

Peran Komite Sekolah yang nampak menonjol dalam penjadwalan kegiatan kurikuler adalah pada peran mendukung kegiatan tersebut. Di samping juga, pada urutan berikutnya adalah memberikan pertimbangan.

Tabel 16. Penjadwalan Kegiatan Ekstrakurikuler

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	12	21,4	14	21,2
2.	Mendukung	23	41,1	18	27,3
3.	Mengontrol	2	3,6	2	3,0
4.	Menjadi mediator				
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	6	10,7	23	34,8
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol			1	1,5
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator	1	1,8	1	1,5
8.	Mendukung & mengontrol	5	8,9	2	3,0
9.	Mendukung & menjadi mediator	2	3,6		
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	4	7,1	5	7,6
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator	1	1,8		
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
	Jumlah				

Sejalan dengan perannya dalam penjadwalan kegiatan kurikuler, peran Komite Sekolah dalam penjadwalan kegiatan ekstrakurikuler juga cenderung memberi dukungan.

Tabel 17. Penyediaan Sumber Daya Manusia

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	18	31,0	11	16,9
2.	Mendukung	17	29,3	26	40,0
3.	Mengontrol			1	1,5
4.	Menjadi mediator				
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	12	20,7	19	29,2
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol	1	1,7		
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator	3	5,2	2	3,1
8.	Mendukung & mengontrol	2	3,4		
9.	Mendukung & menjadi mediator	1	1,7	3	4,6
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	2	3,4	3	4,6
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator	2	3,4		
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
	Jumlah				

Berkenaan dengan penyediaan sumber daya manusia (SDM), Komite Sekolah di Kota Yogyakarta cenderung memberi pertimbangan; berbeda dengan Komite Sekolah di Kabupaten Kulon Progo cenderung mendukung penyediaan SDM.

Tabel 18. Pembinaan Sumber Daya Manusia

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	12	20,7	11	17,2
2.	Mendukung	23	39,7	42	65,6
3.	Mengontrol	2	3,4		
4.	Menjadi mediator	5	8,6		
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	10	17,2	9	14,1
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol	1	1,7		
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator	1	1,7		
8.	Mendukung & mengontrol			1	1,6
9.	Mendukung & menjadi mediator				
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	3	5,2	1	1,6
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator	1	1,7		
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
	Jumlah				

Pada tataran pembinaan SDM, Komite Sekolah baik di Kota Yogyakarta maupun di Kabupaten Kulon Progo lebih cenderung berperan mendukung apa yang dilakukan sekolah dalam membina SDM.

Tabel 19. Kesejahteraan Guru, Karyawan, dan Personalia Lainnya

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	12	21,1	30	48,4
2.	Mendukung	26	45,6	17	27,4
3.	Mengontrol				
4.	Menjadi mediator	1	1,8	1	1,6
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	10	17,5	10	16,1
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol				
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator				
8.	Mendukung & mengontrol			2	3,2
9.	Mendukung & menjadi mediator	1	1,8		
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	4	7,0	2	3,2
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator	1	1,8		
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator	1	1,8		
	Jumlah				

Dalam memperhatikan kesejahteraan guru, Komite Sekolah di Kota Yogyakarta lebih memberi dukungan kepada sekolah, sedangkan Komite Sekolah di Kabupaten Kulon Progo cenderung memberikan pertimbangan kepada sekolah.

Tabel 20. Penyediaan Fasilitas Fisik (gedung, ruang kelas, lapangan, halaman, sarana fisik lainnya)

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	15	25,9	11	16,7
2.	Mendukung	22	37,9	28	42,2
3.	Mengontrol	1	1,7	1	1,5
4.	Menjadi mediator	1	1,7	1	1,5
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	7	12,1	11	16,7
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol				
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator				
8.	Mendukung & mengontrol	2	3,4	1	1,5
9.	Mendukung & menjadi mediator	1	1,7	2	3,0
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	4	6,9	6	9,1
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator	1	1,7		
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator	4	6,9	5	7,6
	Jumlah				

Komite Sekolah di Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Kabupaten Kulon Progo berperan mendukung dalam penyediaan fasilitas fisik untuk menunjang implementasi KTSP di sekolah.

Tabel 21. Pemeliharaan Fasilitas Fisik (gedung, ruang kelas, lapangan, halaman, sarana fisik lainnya)

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	10	17,9	5	8,2
2.	Mendukung	25	44,6	28	45,9
3.	Mengontrol	3	5,4	2	3,3
4.	Menjadi mediator			1	1,6
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	4	7,1	12	19,7
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol	1	1,8	1	1,6
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator				
8.	Mendukung & mengontrol	4	7,1	3	4,9
9.	Mendukung & menjadi mediator	1	1,8		
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	5	8,9	2	3,3
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator				
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator	1	1,8	1	1,6
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator	2	3,6	6	9,8
	Jumlah				

Sejalan dengan penyediaan fasilitas fisik, Komite Sekolah baik di Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Kulon Progo juga mendukung dalam pemeliharaan fasilitas fisik untuk menunjang implementasi KTSP di sekolah.

Tabel 22. Penyediaan Dana/Pembiayaan untuk Fasilitas Fisik

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	8	14,0	15	23,1
2.	Mendukung	23	40,4	19	29,2
3.	Mengontrol			3	4,6
4.	Menjadi mediator	5	8,8		
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	7	12,3	9	13,8
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol				
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator	2	3,5		
8.	Mendukung & mengontrol	3	9,3	8	12,3
9.	Mendukung & menjadi mediator	2	3,5	5	7,7
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	4	7,0	2	3,1
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator	1	1,8	1	1,5
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator	2	3,5	3	4,6
	Jumlah				

Dalam menyediakan dana untuk kebutuhan fasilitas fisik, peran Komite Sekolah juga cenderung mendukung apa yang diperlukan sekolah dalam rangka memperlancar implementasi KTSP.

Tabel 23. Penyediaan Dana/Pembiayaan untuk Fasilitas yang Langsung untuk Pembelajaran

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	4	7,0	12	18,2
2.	Mendukung	36	63,2	23	50,0
3.	Mengontrol				
4.	Menjadi mediator	4	7,0	3	4,5
5.	Memberi pertimbangan & mendukung			12	18,2
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol				
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator				
8.	Mendukung & mengontrol	1	1,8	1	1,5
9.	Mendukung & menjadi mediator	1	1,8		
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	3	5,3	4	6,1
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator	1	1,8	1	1,5
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator	1	1,8		
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator	2	3,6		
	Jumlah				

Tidak berbeda dengan peran Komite Sekolah dalam penyediaan dana untuk fasilitas fisik, peran Komite Sekolah dalam penyediaan fasilitas fisik yang langsung untuk pembelajaran juga cenderung memberi dukungan kepada sekolah.

Tabel 24. Penggunaan Dana/Pembiayaan untuk Fasilitas Fisik

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	4	7,1	11	16,9
2.	Mendukung	16	28,6	11	16,9
3.	Mengontrol	14	25,0	13	20,0
4.	Menjadi mediator	1	1,8	1	1,5
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	9	16,1	9	13,8
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol	1	1,8	7	10,8
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator				
8.	Mendukung & mengontrol	3	5,4	6	9,2
9.	Mendukung & menjadi mediator	2	3,6		
10.	Mengontrol & menjadi mediator			1	1,5
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	2	3,6	4	6,2
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator	1	1,8		
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator	1	1,8		
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator	2	3,6	2	3,1
	Jumlah				

Peran Komite Sekolah dalam penggunaan dana untuk penyediaan fasilitas fisik cenderung pada dua peran yaitu mendukung dan mengontrol, baik di Kota Yogyakarta maupun di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 25. Penggunaan Dana/Pembiayaan untuk Fasilitas yang Langsung untuk Pembelajaran

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	4	7,0	6	9,1
2.	Mendukung	27	47,4	24	36,4
3.	Mengontrol	11	19,3	10	15,2
4.	Menjadi mediator			1	1,5
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	3	5,3	13	19,7
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol			2	3,0
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator			1	1,5
8.	Mendukung & mengontrol	8	14,0	4	6,0
9.	Mendukung & menjadi mediator	1	1,8	1	1,5
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	1	1,8	4	6,0
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator				
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator	2	3,6		
	Jumlah				

Peran Komite Sekolah di Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Kulon Progo dalam penggunaan dana untuk penyediaan fasilitas fisik yang langsung untuk pembelajaran juga cenderung pada dua peran yaitu mendukung dan mengontrol apa yang dikerjakan sekolah.

Tabel 26. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	4	7,0	6	9,2
2.	Mendukung	17	29,8	25	38,5
3.	Mengontrol	14	24,6	17	26,2
4.	Menjadi mediator			1	1,5
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	1	1,8	3	4,6
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol	2	3,5	6	9,2
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator				
8.	Mendukung & mengontrol	14	24,6	3	4,6
9.	Mendukung & menjadi mediator	1	1,8		
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	3	5,3	3	4,6
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator				
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator	1	1,8	1	1,5
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
	Jumlah				

Untuk mencapai penggunaan dana yang transparan dan akuntabel, Komite Sekolah di Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Kulon Progo banyak melaksanakan perannya sebagai pendukung dan pengontrol.

Tabel 27. Manajemen Operasional (misal: koordinasi, komunikasi, rapat, dll.)

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	7	12,5	2	3,1
2.	Mendukung	18	32,1	28	43,1
3.	Mengontrol	4	7,1		
4.	Menjadi mediator	4	7,1	14	21,5
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	7	12,5	7	10,8
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol	2	3,6	2	3,1
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator				
8.	Mendukung & mengontrol				
9.	Mendukung & menjadi mediator	3	5,4	4	6,2
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	2	3,6	4	6,2
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator	6	10,7	2	3,1
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator	3	5,4	2	3,1
	Jumlah				

Dalam manajemen operasional untuk menunjang implementasi KTSP, Komite Sekolah baik di Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Kulon Progo cenderung berperan mendukung kegiatan sekolah.

Tabel 28. Mekanisme Pengendalian atau *Control*

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	7	13,2	17	26,2
2.	Mendukung	11	20,8	11	16,9
3.	Mengontrol	3	24,5	19	29,2
4.	Menjadi mediator	3	5,7	3	4,6
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	6	11,3	2	3,1
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol	5	9,4	3	4,6
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator	2	3,8		
8.	Mendukung & mengontrol	4	7,5	7	10,8
9.	Mendukung & menjadi mediator				
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	2	3,8	1	1,5
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator				
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator			2	3,1
	Jumlah				

Peran Komite Sekolah dalam upaya pengendalian atau kontrol pelaksanaan KTSP, lebih banyak pada peran mengontrol aktivitas sekolah. Hal ini berlaku di Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 29. Penyusunan dan Pengembangan RPP

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	5	10,0	5	7,9
2.	Mendukung	35	70,0	45	71,4
3.	Mengontrol	1	2,0		
4.	Menjadi mediator			4	6,3
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	4	8,0	4	6,3
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol	1	2,0	1	1,6
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator	1	2,0		
8.	Mendukung & mengontrol	1	2,0	3	4,8
9.	Mendukung & menjadi mediator	1	2,0		
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	1	2,0	1	1,6
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator				
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
	Jumlah				

Dalam penyusunan dan pengembangan RPP, Komite Sekolah cenderung mendukung kegiatan yang dilakukan sekolah, baik di Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 30. Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas (termasuk implementasi inovasi pembelajaran, jika ada)

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	6	12,5	12	18,8
2.	Mendukung	29	60,4	36	56,3
3.	Mengontrol	1	2,1	5	7,8
4.	Menjadi mediator			1	1,6
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	2	4,2	6	9,4
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol			1	1,6
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator				
8.	Mendukung & mengontrol	3	6,3	1	1,6
9.	Mendukung & menjadi mediator	4	8,3		
10.	Mengontrol & menjadi mediator			1	1,6
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	2	4,2	1	1,6
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator				
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator	1	2,1		
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
	Jumlah				

Dalam upaya untuk mencapai efektivitas pembelajaran pada tahap pelaksanaan KTSP, Komite Sekolah banyak berperan sebagai pendukung program maupun kegiatan sekolah.

Tabel 31. Evaluasi Hasil Belajar Formatif (Harian)

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	2	3,6	13	20,0
2.	Mendukung	29	52,7	38	58,5
3.	Mengontrol	6	10,9	5	7,7
4.	Menjadi mediator			1	1,5
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	2	3,6	3	4,6
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol			2	3,1
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator				
8.	Mendukung & mengontrol	11	20	3	4,6
9.	Mendukung & menjadi mediator	2	3,6		
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	2	3,6		
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator				
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator	1	1,8		
	Jumlah				

Dalam rangkaian pelaksanaan pembelajaran, yaitu evaluasi formatif, Komite Sekolah mendukung kegiatan yang dilakukan sekolah.

Tabel 32. Evaluasi Hasil Belajar Tengah Semester

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	2	3,8	5	7,6
2.	Mendukung	32	60,4	38	57,6
3.	Mengontrol	4	7,5	1	1,5
4.	Menjadi mediator	1	1,9	1	1,5
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	2	3,8	8	12,1
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol	1	1,9	1	1,5
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator				
8.	Mendukung & mengontrol	7	13,2	8	12,1
9.	Mendukung & menjadi mediator	2	3,8		
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	2	3,8	4	6,1
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator				
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
	Jumlah				

Sebagaimana peran Komite Sekolah dalam evaluasi harian, dalam evaluasi belajar tengah semester Komite Sekolah juga mendukung program atau kegiatan yang dilakukan sekolah.

Tabel 33. Evaluasi Hasil Belajar Akhir Semester

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	2	3,7	6	9,7
2.	Mendukung	30	55,6	35	56,5
3.	Mengontrol	9	16,7	2	3,2
4.	Menjadi mediator	1	1,9	2	3,2
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	1	1,9	6	9,7
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol			1	1,6
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator				
8.	Mendukung & mengontrol	7	13,0	6	9,7
9.	Mendukung & menjadi mediator	1	1,9	1	1,6
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	3	5,6	3	4,8
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator				
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
	Jumlah				

Komite Sekolah juga mendukung pelaksanaan evaluasi hasil belajar akhir semester, baik di Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Kulon Progo.

Sesuai dengan uraian tersebut di atas, peran Komite Sekolah dalam tahap pelaksanaan KTSP, cenderung berperan mendukung dan memberi pertimbangan, kecuali pada aspek yang berkenaan dengan keuangan dan pengendalian; Komite Sekolah cenderung melaksanakan dua peran yaitu mendukung dan mengontrol.

E. Tahap Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Tabel 34. Kegiatan Monitoring

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	5	9,3	11	17,2
2.	Mendukung	22	40,7	33	51,6
3.	Mengontrol	6	11,1	7	10,9
4.	Menjadi mediator	6	11,1		
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	1	1,9	5	7,8
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol	4	7,4	2	3,1
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator			1	1,6
8.	Mendukung & mengontrol	6	11,1	2	3,1
9.	Mendukung & menjadi mediator				
10.	Mengontrol & menjadi mediator	1	1,9		
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	2	3,7	3	4,7
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator	1	1,9		
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
	Jumlah				

Dalam kegiatan monitoring implementasi KTSP, Komite Sekolah cenderung melaksanakan dua peran, yaitu mendukung dan mengontrol kegiatan yang dilakukan sekolah. Hal ini berlaku di Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 35. Kegiatan Evaluasi Implementasi KTSP

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	4	7,3	13	20,6
2.	Mendukung	29	52,7	31	49,2
3.	Mengontrol	8	14,5	3	4,8
4.	Menjadi mediator	2	3,6	1	1,6
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	3	5,5	10	15,9
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol	2	3,6		
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator			1	1,6
8.	Mendukung & mengontrol	4	7,3	2	3,2
9.	Mendukung & menjadi mediator				
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	2	3,6	2	3,2
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator	1	1,8		
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
	Jumlah				

Dalam kegiatan evaluasi implementasi KTSP, Komite Sekolah di Kota Yogyakarta cenderung melaksanakan peran mendukung dan mengontrol. Lain halnya dengan Komite Sekolah di Kabupaten Kulon Progo yang cenderung melaksanakan peran mendukung dan memberi pertimbangan.

Tabel 36. Tindak Lanjut

No	Peran Komite Sekolah	Kota Yogya		Kab. KP	
		f	(%)	f	(%)
1.	Memberi pertimbangan	9	16,7	26	41,3
2.	Mendukung	23	42,6	20	31,7
3.	Mengontrol	3	5,6		
4.	Menjadi mediator	5	9,3	1	1,6
5.	Memberi pertimbangan & mendukung	7	13,0	7	11,1
6.	Memberi pertimbangan & mengontrol			1	1,6
7.	Memberi pertimbangan & menjadi mediator			1	1,6
8.	Mendukung & mengontrol	1	1,9	2	3,2
9.	Mendukung & menjadi mediator			1	1,6
10.	Mengontrol & menjadi mediator				
11.	Memberi pertimbangan, mendukung, & mengontrol	2	3,7	2	3,2
12.	Memberi pertimbangan, mendukung, & menjadi mediator	1	1,9	2	3,2
13.	Memberi pertimbangan, mengontrol, & menjadi mediator				
14.	Mendukung, mengontrol, & menjadi mediator				
15.	Memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol, & menjadi mediator	3	5,6		
	Jumlah				

Dalam hal menindaklanjuti program implementasi KTSP, Komite Sekolah di Kota Yogyakarta cenderung mendukung sekolah, sedangkan di Kabupaten Kulon Progo cenderung memberi pertimbangan.

Secara umum, peran Komite Sekolah dalam tahap monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut cenderung pada peran mendukung, mempertimbangkan, dan mengontrol.

F. Kendala-kendala Peran Komite Sekolah

Beberapa kendala yang dapat mengurangi intensitas peran komite sekolah dalam implementasi KTSP di SD, dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Pemahaman KTSP kurang
2. Kurangnya dana komite
3. Kesibukan bekerja
4. SDM komite kurang
5. Sulit koordinasi
6. Sosialisasi peran komite belum efektif
7. Frekuensi pertemuan kurang
8. Fasilitas belum lengkap
9. Komite kurang aktif
10. Latar belakang komite (pendidikan, pekerjaan)
11. Komunikasi antar sekolah dengan komite masih kurang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran komite sekolah yang menonjol dalam langkah persiapan implementasi KTSP di SD adalah sebatas pada peran memberi dukungan dan memberikan pertimbangan.
2. Peran yang paling banyak dilakukan oleh Komite Sekolah dalam Tahap Penyusunan KTSP adalah memberikan dukungan kepada sekolah, kecuali pada saat pembahasan I draf KTSP, Komite Sekolah lebih banyak memberikan pertimbangan.
3. Peran Komite Sekolah dalam tahap pelaksanaan KTSP, cenderung berperan mendukung dan memberi pertimbangan, kecuali pada aspek yang berkenaan dengan keuangan dan pengendalian; Komite Sekolah cenderung melaksanakan dua peran yaitu mendukung dan mengontrol.
4. Peran Komite Sekolah dalam tahap monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut cenderung pada peran mendukung, mempertimbangkan, dan mengontrol.
5. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran komite sekolah dalam implementasi KTSP di SD, antara lain: pemahaman KTSP kurang, kurangnya dana komite, kesibukan bekerja, SDM

komite kurang, sulitnya koordinasi, sosialisasi peran komite belum efektif, frekuensi pertemuan kurang, fasilitas belum lengkap, pengurus komite kurang aktif, latar belakang komite (pendidikan, pekerjaan), serta komunikasi antar sekolah dengan komite masih kurang.

B. Saran

1. Peran komite sekolah sebagai mediator belum nampak efektif dilaksanakan dalam implementasi KTSP. Oleh karena itu perlu kiranya ada upaya memperkuat hubungan antara pihak sekolah dan pengurus komite, antara lain dengan cara sosialisasi fungsi dan peran komite sekolah yang intensif dengan bantuan pihak Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Rekrutmen pengurus komite sekolah perlu dilakukan secara intensif dengan memperjelas kewenangan, fungsi, dan peran komite sekolah yang tidak sekedar sebagaimana BP3 atau POMG.

DAFTAR PUSTAKA

- BSNP. (2006). *Panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta.
- Charters, W. & Jones, J. 1973. *On the neglect of the independent variabele in program evaluation*. Unpublihsed paper. Eugene: University of Oregon.
- Depdiknas. (2001). *Manajemen berbasis sekolah untuk Sekolah Dasar*. Jakarta: Dit TK dan SD.
- Depdiknas. (2002). *Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah: Konsep dasar*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- Fullan, M.G. 2001. *The new meaning of educational change*. London: Routledge Falmer.
- Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Sallis, Edward. (1993). *Total quality management in education*. Philadelphia: Kogan Page.
- Syafaruddin. (2002). *Manajemen mutu terpadu dalam pendidikan: Konsep, strategi, dan aplikasi*. Jakarta: Grasindo.
- Taylor, N. & Vinjevold, P. 1999. *Getting learning right: Report of the President's Education Initiative Project*. Johannesburg, South Africa: Joint Education Trust.
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Wardan Suyanto, Zamzani, dan Kastam Syamsi. (2006). "Kesiapan Sekolah Dasar dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di DIY". *Laporan Penelitian (t.t.)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- West-Burnham, John. (1997). *Managing quality in schools (2nd Ed.): Effective strategies for quality-based school improvement*. London: Financial Time. Prentice Hall.